



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aidul Fitriciada Azhari
Jabatan : Ketua Komisi Yudisial RI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 26 Februari 2016
Ketua Komisi Yudisial,

Aidul Fitriciada Azhari



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aidul Fitriciada Azhari**

Jabatan : **Ketua Komisi Yudisial RI**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 26 Februari 2016
Ketua Komisi Yudisial,

Aidul Fitriciada Azhari



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maradaman Harahap

Jabatan : Ketua Sementara Komisi Yudisial RI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 18 Januari 2016

Ketua Sementara Komisi Yudisial,

Maradaman Harahap

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA yang kompeten dan berintegritas.	Persentase Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial.	70%
2.	Terwujudnya peningkatan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim.	Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas.	2%
3.	Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.	Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain.	100%
4.	Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Persentase penurunan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	5%
5.	Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim.	Indeks kepercayaan publik terhadap hakim.	Skor 45
6.	Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien.	Persentase peningkatan pelayanan publik.	85%

Program:

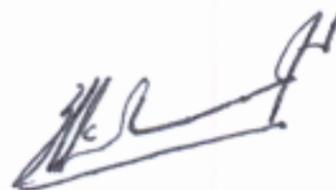
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial.
- Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim.

Anggaran:

Rp95.438.879.000,00
Rp53.436.000.000,00

Jakarta, 18 Januari 2016

Ketua Sementara Komisi Yudisial RI,



Maradaman Harahap

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Danang Wijayanto**

Jabatan : **Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 26 Februari 2016

Sekretaris Jenderal,

**Danang Wijayanto, Ak.,M.Si
NIP 19620402 198203 1 001**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danang Wijayanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Aidul Fitriadi Azhari
Jabatan : Ketua Komisi Yudisial RI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Februari 2016

Pihak Kedua,

Aidul Fitriadi Azhari

Pihak Pertama,

Danang Wijayanto,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

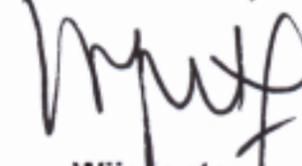
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya jumlah Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial.	1. Persentase pemenuhan jumlah Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung.	70%
2.	Meningkatnya kompetensi, integritas dan kesejahteraan hakim.	1. Persentase peningkatan keberhasilan peningkatan kapasitas hakim.	2%
		2. Persentase pemenuhan jaminan keamanan dan kesehatan hakim.	70%
3.	Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain.	1. Persentase penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain secara tepat waktu.	100%
4.	Meningkatnya kinerja pengawasan perilaku hakim.	1. Persentase peningkatan penyelesaian laporan masyarakat yang diselesaikan tepat waktu .	15%
5.	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kehormatan dan keluhuran martabat hakim.	2. Persentase penurunan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di 6 wilayah Indonesia.	5%
6.	Diterapkannya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.	1. Peningkatan nilai RB	Skor 100
		2. Mencapai opini WTP oleh BPK.	WTP
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik Komisi Yudisial mencapai predikat baik (Skor 3.5 dari skala 4 pada tahun 2019)	Skor 2.5
		4. Indeks persepsi masyarakat terhadap kinerja Komisi Yudisial (mencapai angka 4 dari skala 5 pada tahun 2019)	Skor 2
		5. Skor LAKIP KY	Nilai B

Program:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial. | Anggaran:
Rp95.438.879.000.00 |
| 2. Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim. | Anggaran:
Rp53.436.000.000.00 |

Jakarta, 26 Februari 2016

Sekretaris Jenderal,



Danang Wijayanto
NIP 19620402 198203 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danang Wijayanto

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 18 Januari 2016

Sekretaris Jenderal,

**Danang Wijayanto, Ak.,M.Si
NIP 19620402 198203 1 001**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danang Wijayanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Maradaman Harahap
Jabatan : Ketua Sementara Komisi Yudisial RI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Maradaman Harahap

Jakarta, 18 Januari 2016

Pihak Pertama,

Danang Wijayanto,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya jumlah Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial.	Persentase pemenuhan jumlah Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung.	70%
2.	Meningkatnya kompetensi, integritas dan kesejahteraan hakim.	1. Persentase peningkatan keberhasilan peningkatan kapasitas hakim.	2%
		2. Persentase pemenuhan jaminan keamanan dan kesehatan hakim.	70%
3.	Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain.	Persentase penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain secara tepat waktu.	100%
4.	Meningkatnya kinerja pengawasan perilaku hakim.	Persentase peningkatan penyelesaian laporan masyarakat yang diselesaikan tepat waktu.	15%
5.	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kehormatan dan keluhuran martabat hakim.	Persentase penurunan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di 6 wilayah Indonesia.	5%
6.	Diterapkannya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.	1. Peningkatan nilai RB	Skor 100
		2. Mencapai opini WTP oleh BPK.	WTP
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik Komisi Yudisial mencapai predikat baik (Skor 3.5 dari skala 4 pada tahun 2019)	Skor 2.5
		4. Indeks persepsi masyarakat terhadap kinerja Komisi Yudisial (mencapai angka 4 dari skala 5 pada tahun 2019)	Skor 2
		5. Skor LAKIP KY	Nilai B

Program:

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial.
- Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim.

Anggaran:

Rp95.438.879.000.00
Rp53.436.000.000.00

Jakarta, 18 Januari 2016
Sekretaris Jenderal,



Danang Wijayanto
NIP 19620402 198203 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Purnomo
Jabatan : Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Danang Wijayanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

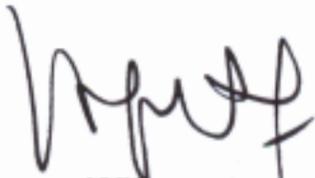
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Januari 2016

Pihak Kedua,


Danang Wijayanto
NIP 19620402 198203 1 001

Pihak Pertama,


Heru Purnomo
NIP 19650910 198703 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terselenggaranya proses seleksi calon Hakim Agung dan calon Hakim <i>Adhoc</i> di Mahkamah Agung.	1.	Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan seleksi calon Hakim Agung dan Hakim <i>Adhoc</i> di Mahkamah Agung.	3 Laporan
2.	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas hakim.	1.	Jumlah hakim yang mengikuti pelatihan KEPPH berkelanjutan.	570 Orang
		2.	Jumlah laporan pengukuran indeks keberhasilan peningkatan kapasitas hakim (PKH).	1 Laporan
3.	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kesejahteraan hakim.	1.	Jumlah rekomendasi pemenuhan jaminan keamanan dan kesehatan.	2 Rekomendasi
4.	Terselenggaranya kegiatan advokasi hakim.	1.	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan advokasi, pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang perseorangan/badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.	2 Laporan
5.	Terselenggaranya <i>Judicial Education</i> terkait dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.	1.	Jumlah laporan penyelenggaraan <i>Judicial Education</i> terkait dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.	2 Laporan

Kegiatan:

Seleksi Hakim Agung, Hakim *Adhoc* di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.

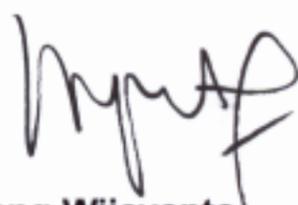
Anggaran:

Rp24.350.000.000,00

Jakarta, 18 Januari 2016

Kepala Biro Rekrutmen,
Advokasi dan Peningkatan
Kapasitas Hakim,

Sekretaris Jenderal,



Danang Wijayanto
NIP 19620402 198203 1 001



Heru Purnomo
NIP 19650910 198703 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Onni Rosleini
Jabatan : Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim

selanjutnya disebut pihak pertama

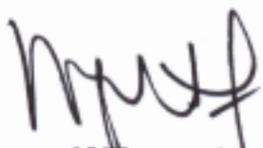
Nama : Danang Wijayanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

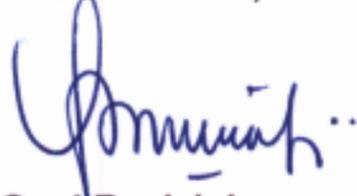
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Danang Wijayanto
NIP 19620402 198203 1 001

Jakarta, 18 Januari 2016

Pihak Pertama,


Onni Rosleini
NIP 19631107 198903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelesaian laporan masyarakat terhadap hakim yang diduga melanggar KEPPH sampai dengan keluarnya keputusan.	1. Jumlah dokumen hasil sidang atas penanganan laporan masyarakat.	125 Laporan
		2. Jumlah dokumen laporan verifikasi yang dapat dilakukan registrasi dan ditindaklanjuti penanganannya.	460 Dokumen
		3. Jumlah keputusan sidang MKH yang diusulkan oleh KY.	10 Rekomendasi
		4. Jumlah laporan pemantauan hasil persidangan.	99 Laporan

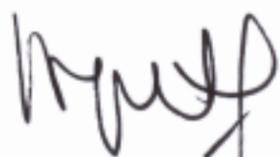
Kegiatan:

Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH

Anggaran:

Rp19.587.600.000,00

Sekretaris Jenderal,



Danang Wijayanto
NIP 19620402 198203 1 001

Jakarta, 18 Januari 2016

Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim,



Onni Rosleini
NIP 19631107 198903 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO INVESTIGASI
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Johannes Kwartanto Hariadi
Jabatan : Kepala Biro Investigasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Danang Wijayanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

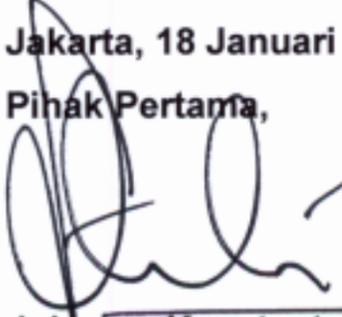
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Danang Wijayanto
NIP 19620402 198203 1 001

Jakarta, 18 Januari 2016

Pihak Pertama,


Johanes Kwartanto Hariadi
NRP 59121311

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BIRO INVESTIGASI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelenggaraan penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim.	Jumlah laporan rekam jejak hakim dan calon hakim.	126 Laporan
2.	Penyelenggaraan pendalaman kasus atas dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim.	Jumlah laporan investigasi pendalaman kasus.	312 Laporan

Kegiatan:

Penyelenggaraan investigasi hakim dan calon hakim.

Anggaran:

Rp9.498.400.000,00

Sekretaris Jenderal,



Danang Wijayanto
NIP 19620402 198203 1 001

Jakarta, 18 Januari 2016

Kepala Biro Investigasi,



Johanes Kwartanto Hariadi
NRP 59121311

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roejito
Jabatan : Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Danang Wijayanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Januari 2016

Pihak Kedua,


Danang Wijayanto
NIP 19620402 198203 1 001

Pihak Pertama,


Roejito
NIP 19590921 198203 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya layanan informasi bidang yudisial untuk masyarakat.	1. Jumlah bentuk desiminasi publik.	18 Buku/Bahan Publikasi
		2. Jumlah laporan pelaksanaan edukasi dan informasi kepada publik.	17 Laporan
		3. Jumlah laporan hasil analisis putusan untuk rekomendasi mutasi hakim.	10 Laporan
		4. Jumlah laporan hasil penelitian dan pengkajian.	17 Laporan
		5. Jumlah laporan hasil pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.	3 Laporan
		6. Jumlah pengadaan buku.	70 Judul
2.	Terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik berdasar cetak biru TI Komisi Yudisial 2015-2019.	1. Jumlah aplikasi dalam pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi.	8 Aplikasi
		2. Jumlah pengadaan peralatan IT.	4 Unit

Kegiatan:

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik.

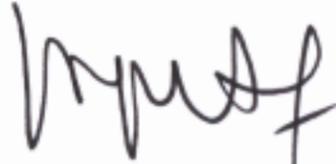
Anggaran:

Rp12.322.340.000,00

Jakarta, 18 Januari 2016

Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi,


Danang Wijayanto
NIP 19620402 198203 1 001


Roejito
NIP 19590921 198203 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ronny Dolfinus Tulak
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Danang Wijayanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

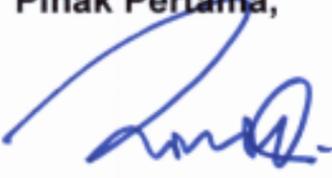
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Januari 2016

Pihak Kedua,


Danang Wijayanto
NIP 19620402 198203 1 001

Pihak Pertama,


Ronny Dolfinus Tulak
NIP 19590702 198703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi.	1. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan.	18 Dokumen
		2. Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang diselesaikan.	24 Laporan
2.	Tersusunnya produk hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Jumlah produk hukum yang tersusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	48 Dokumen
3.	Tersusunnya dokumen organisasi dan tata laksana sesuai tugas dan fungsi organisasi.	Jumlah dokumen organisasi dan tata laksana yang tersusun sesuai tugas dan fungsi organisasi.	10 Dokumen
4.	Terselenggaranya kepatuhan internal di Komisi Yudisial.	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan kepatuhan internal.	20 Laporan

Kegiatan:

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal

Anggaran:

Rp13.591.220.000,00

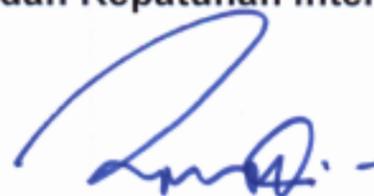
Sekretaris Jenderal,



Danang Wijayanto
NIP 19620402 198203 1 001

Jakarta, 18 Januari 2016

Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal,



Ronny Dolfinus Tulak
NIP 19590702 198703 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roejito
Jabatan : Plt. Kepala Biro Umum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Danang Wijayanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Januari 2016

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Danang Wijayanto
NIP 19620402 198203 1 001


Roejito
NIP 19590921 198203 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BIRO UMUM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan keuangan.	Jumlah laporan administrasi dan pengelolaan keuangan.	14 Laporan
2.	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan keprotokolan.	1. Jumlah dokumen pengelolaan dan pengembangan SDM.	18 Dokumen
		2. Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha, kearsipan dan keprotokolan.	25 Laporan
3.	Terlaksananya kegiatan layanan perlengkapan dan rumah tangga.	1. Jumlah laporan penyelenggaraan operasional perkantoran.	47 Laporan
		2. Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial.	60.500 Eksemplar
		3. Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan.	300 Unit
4.	Terlaksananya pengelolaan penghubung, kegiatan kerjasama dan hubungan antar lembaga.	1. Jumlah laporan penyelenggaraan pengembangan dan peningkatan kinerja penghubung dalam pelaksanaan "access to justice" di wilayah penghubung.	60 Laporan
		2. Jumlah dokumen kerjasama yang dibuat KY dengan stakeholder.	11 Dokumen
		3. Jumlah laporan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring.	3 Laporan
5.	Layanan perkantoran.	Layanan perkantoran.	12 Bulan

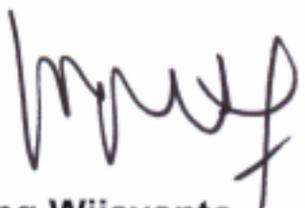
Kegiatan:

Penyelenggaraan dan pengelolaan penghubung, kegiatan kerjasama, keuangan, perlengkapan rumah tangga, tata usaha, dan pengembangan SDM di lingkungan Komisi Yudisial.

Anggaran:

Rp 69.525.319.000,00

Sekretaris Jenderal,


Danang Wijayanto
 NIP 19620402 198203 1 001

Jakarta, 18 Januari 2016

Plt. Kepala Biro Umum,


Roejito
 NIP 19590921 198203 1 004